

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Badan Pertanahan Nasional di Wilayah Provinsi DKI Jakarta mengenai analisis efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan dari tahun 2019 hingga 2022, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan Badan Pertanahan Nasional di Provinsi DKI Jakarta selama periode empat tahun, yaitu dari 2019 hingga 2022, berdasarkan analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi secara umum sudah efisien dan efektif. Penjelasan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kesimpulan kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari rasio efektivitas (realisasi penerimaan/target penerimaan) menunjukkan bahwa rata-rata selama empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah BPN Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan secara keseluruhan sudah baik. Meskipun ada beberapa wilayah pada periode anggaran antara 2019-2022 belum efektif (BPN Jakarta Timur, BPN Jakarta Barat dan BPN Jakarta Utara) namun, secara umum wilayah tersebut efektif.
 - b. Kesimpulan kinerja keuangan BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilihat dari rasio efisiensi (realisasi belanja/realisasi

penerimaan) menunjukkan bahwa rata-rata selama empat tahun (2019-2022) kinerja keuangan di wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta secara keseluruhan dalam 5 wilayah tersebut sudah "Sangat Efisien".

2. Evaluasi kinerja keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kinerja keuangan BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Terus dilakukan untuk mempertahankan kinerja yang baik dan meningkatkan aspek yang kurang dengan inovasi sistem untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi mencapai target kinerja yang optimal dan layanan yang maksimal kepada masyarakat.
- b. Masih ada kendala di beberapa wilayah terkait SDM.
- c. Diperlukan program kerja dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- d. Meningkatkan pengetahuan serta keterampilan SDM di bidang keuangan agar kinerja lebih efektif.
- e. Dibutuhkan perbaikan efisiensi sosialisasi peraturan yang intensif dan kepatuhan terhadap peraturan di BPN DKI Jakarta.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat implikasi yang dapat diterapkan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah sebagai landasan untuk membandingkan teori dengan realitas lapangan. Penelitian ini berpotensi menjadi referensi penting dalam pengembangan studi-studi serupa untuk mendalami lebih lanjut tentang kinerja keuangan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Penggunaan rasio efektivitas dan efisiensi dalam analisis ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga bagi Kementerian atau Lembaga terkait di DKI Jakarta dalam proses pengambilan keputusan terkait perencanaan dan implementasi anggaran pada periode mendatang.

2. Implikasi Praktis

a. Bagi Kementerian Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penting bagi Kementerian Keuangan dalam proses pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan untuk lembaga pemerintahan, hal ini menjadi temuan peneliti berhubungan dengan penyusunan Laporan Keuangan yang dimulai dari anggaran sampai realisasi pada lembaga pemerintahan yang tidak adanya transparansi pada tahun ke tahun

sehingga masyarakat kebingungan mengenai Laporan Keuangan pada lembaga pemerintahan.

b. Bagi Badan Pemeriksa Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan pengawasan terhadap lembaga negara dalam penggunaan keuangan secara efektif dan efisien. Temuan terkait kurangnya ketelitian dalam penginputan laporan persediaan oleh BPN menunjukkan perlunya tindakan preventif dari BPK, seperti memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada BPN untuk mencegah kesalahan yang dapat merugikan keuangan negara. Monitoring yang terus-menerus terhadap penggunaan aplikasi juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan dalam pengelolaan keuangan negara.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

Penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan atau acuan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan. Selain itu, hasilnya juga dapat menjadi alat koreksi bagi Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dalam mengevaluasi dan meningkatkan pengukuran serta pengelolaan kinerja keuangan mereka, hal ini untuk meningkatkan kinerja keuangan dan operasional di wilayah BPN DKI Jakarta, BPN perlu mengambil langkah-langkah yang terfokus pada peningkatan pencairan anggaran, penginputan laporan persediaan, pengembangan SDM, perbaikan efisiensi operasional, meratakan pelaksanaan

kegiatan sepanjang tahun, dan pengelolaan anggaran oleh kantor. Implementasi langkah-langkah ini akan memastikan bahwa BPN DKI Jakarta dapat mencapai target kinerja yang optimal dan memberikan layanan yang maksimal kepada masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat tentang kinerja keuangan daerah khususnya di BPN DKI Jakarta agar masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan anggaran.

C. Keterbatasan Penelitian

Beberapa faktor yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yang seharusnya menjadi perhatian bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji kinerja keuangan di instansi pemerintahan, antara lain:

1. Informan yang diperoleh peneliti hanya didapatkan dalam satu bidang unit kerja.
2. Dalam pengambilan data keterbatasan waktu penelitian dan data yang dikumpulkan.
3. Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian kementerian/lembaga BPN di wilayah Provinsi DKI Jakarta saja, sehingga hasilnya belum dapat menggambar provinsi untuk kinerja keuangan kementerian/lembaga di seluruh Indonesia.

D. Rekomendasi Bagi Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan ringkasan hasil kesimpulan, implikasi, dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan, berikut ini rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Diharapkan untuk mengembangkan informan wawancara dari berbagai bidang atau unit kerja yang berbeda di dalam organisasi.
2. Diharapkan dapat mengkaji metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan menggunakan strategi manajemen waktu yang efisien dan efektif.
3. Diharapkan untuk dapat memperluas cakupan sampel penelitian agar mencakup lebih banyak instansi pemerintahan atau wilayah geografis lainnya.
4. Diharapkan untuk BPN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dapat memperbaiki peningkatan pencairan anggaran, penginputan laporan persediaan, pengembangan SDM, perbaikan efisiensi operasional, evaluasi pelaksanaan kegiatan setiap triwulan dan pengelolaan anggaran yang dicairkan oleh masing-masing kantor.